

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA KEBUMEN KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG

Marlina Nur Asyifa^{1*}, Suryoto², Ranjani³
^{1, 2, 3} Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

*Korespondensi : suryotofisip@gmail.com

ABSTRAK

Rumah merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat, namun, pelengkapan kebutuhan pokok ini masih banyak yang belum layak huni. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kabupaten Batang juga turut aktif dalam program BSPS ini, salah satunya dilakukan di Desa Kebumen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi Program BSPS di Desa Kebumen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program BSPS di Desa Kebumen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dilaksanakan dengan pendekatan top-down dan belum sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dikarenakan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebumen kepada masyarakat penerima program bantuan tidak dilaksanakan dengan baik, kualitas SDM nya masih rendah, ketersediaan dana yang terbatas, dan tim pelaksana program tidak mengetahui dan melaksanakan SOP yang berlaku. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut : (1) Pemerintah Desa Kebumen perlu melakukan sosialisasi yang masif terkait program kepada masyarakat secara menyeluruh, (2) Perlu adanya peningkatan kualitas dan kompetensi bagi tim pelaksana program melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, (3) Masyarakat perlu berpartisipasi secara aktif melalui keterlibatan langsung dalam penyusunan RAB dan rencana penggunaan dana, dan (4) Pemerintah Desa Kebumen perlu menyusun sejak awal jadwal kegiatan pasti dalam pelaksanaan program BSPS ini.

Kata Kunci: Implementasi, Program BSPS, Top-down

ABSTRACT

Houses are an important basic need for society, however, many of these basic needs are still not livable. The Indonesian government, through the PUPR Ministry, created a development-oriented program, namely the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) for low-income communities. The Batang Regency Government is also actively involved in the BSPS program, one of which is carried out in Kebumen Village, Tersono District, Batang Regency. This research aims to see how the BSPS Program is implemented in Kebumen Village, Tersono District, Batang Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this research show that the implementation of the BSPS Program in Kebumen Village, Tersono District, Batang Regency was carried out using a top-down approach and was not completely successful.

This is because the communication carried out by the Kebumen Village government to the people receiving the aid program was not implemented well, the quality of human resources was still low, the availability of funds was limited, and the program implementation team did not know and implement the applicable SOPs. Based on the conclusions from the research results above, the researcher provides the following recommendations: (1) The Kebumen Village Government needs to carry out massive outreach regarding the program to the community as a whole, (2) There is a need to increase the quality and competence of the program implementing team through various educational activities and training, (3) The community needs to participate actively through direct involvement in preparing the RAB and plans for using funds, and (4) the Kebumen Village Government needs to prepare from the start a definite schedule of activities in implementing the BSPS program.

Keywords : *Implementation, BSPS Program, Top-down*

A. PENDAHULUAN

Konteks pelaksanaan kebijakan menyoroti faktor-faktor seperti: (1) kewenangan, keputusan, dan cara para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan; (2) jati diri lembaga dan pemimpin; dan (3) tingkat ketaatan dan timbal balik terhadap kebijakan itu (Ardiansyah & Prabawati, 2023 : 2456).

Salah satu tujuan dari pelaksanaan kebijakan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur melalui berkurangnya angka kemiskinan di suatu daerah. Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya Ritonga (dalam Desyra, et al, 2021 : 35). Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui penyediaan kebutuhan pokok yang meliputi pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat, karena rumah berfungsi sebagai tempat tinggal yang digunakan untuk berlindung, merupakan tempat awal pengembangan kehidupan dapat berperan dalam tumbuhnya kesejahteraan, termasuk

peningkatan perorangan, jati diri, dan identitas bangsa. Namun, pelengkapan kebutuhan pokok ini masih banyak yang belum layak huni, belum memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan belum menjamin kesehatan bagi penghuninya.

Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut adalah faktor ekonomi, kurangnya lahan pekerjaan dan kurangnya kemampuan yang dimiliki, sehingga terjadi jarak dalam kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan, terutama bagi masyarakat miskin sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak. Sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk hidup bercukupan secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini juga ditegaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal merupakan suatu keperluan pokok manusia dalam rangka meningkatkan taraf masyarakat berkecukupan. Oleh karena itu, perbaikan

serta pembentukan kawasan rumah dan hunian menjadi langkah penting dalam memenuhi keperluan tempat tinggal bagi masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal tersebut, pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator dan fasilitator dalam penyediaan perumahan serta perbaikan kondisi perumahan yang sudah ada Anggraini & Kurniawan (dalam Ardiansyah & Prabawati, 2023 : 2457).

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat yang pada tahun 2014 berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. BSPS merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan dana kepada masyarakat dengan penghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara pribadi atau secara berkelompok. Perumahan yang dibangun melalui program BSPS dapat meliputi pembenahan, renovasi, perluasan, atau pembangunan rumah baru serta peningkatan lingkungan sekitarnya (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah masuk kedalam salah satu program yang menjadi fokus sendiri dari Kementerian PUPR.

Program ini masuk kedalam bagian dari usaha pemerintah dalam menangani permasalahan perumahan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembenahan tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). BSPS merupakan bantuan yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan rangsangan atau dorongan kepada masyarakat prasejahtera penerima bantuan agar bersama-sama dengan masyarakat prasejahtera penerima bantuan lainnya melakukan gotong royong dalam membenahi tempat tinggal mereka, dengan dukungan dari masyarakat sekitar. Setiap sektor terkait memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dalam rangka mencapai kelancaran dan tujuan program ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk bahu-membahu juga perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program ini, dikarenakan alokasi agenda kegiatan ini juga berperan dalam keberhasilan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri (Farida dalam Ardiansyah & Prabawati, 2023 : 2457).

Program BSPS dilaksanakan di beberapa provinsi, kabupaten/ kota yang ada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Batang juga turut aktif dalam upaya mengurangi permasalahan rumah kumuh dan tidak layak huni, dengan terus melakukan perbaikan agar tercipta rumah yang bebas dari sarang penyakit dan dapat dihuni dengan baik bagi masyarakat. Di Kabupaten Batang sendiri Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada tahun 2022 sudah di alokasikan sebanyak 1.461 unit. Salah satunya dilakukan di Desa Kebumen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Berikut merupakan data penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa

Kebumen pada tahun 2021-2023 :

Tabel 1. Data Penerima BSPS Desa Kebumen Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Penerima Bantuan / KK	Realisasi Anggaran
1.	2021	5 KK	62.500.000
2.	2022	3 KK	37.500.000
3.	2023	15 KK	256.000.000
Jumlah			356.000.000

Sumber : Pemerintah Desa Kebumen, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas diketahui bahwa di Desa Kebumen pada tahun 2021 terdapat sejumlah 5 orang penerima BSPS dengan masing-masing menerima dana sebanyak 12,5 juta dan total anggaran yang sudah direalisasikan sejumlah 62,5 juta, dana tersebut bersumber dari Bantuan Sosial Kabupaten. Pada tahun 2022 terdapat sejumlah 3 orang penerima BSPS dengan masing-masing orang menerima dana sebanyak 12,5 juta dan total anggaran yang sudah direalisasikan sejumlah 37,5 juta, dana tersebut bersumber dari Bantuan Sosial Kabupaten. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat sejumlah 15 orang penerima BSPS dengan rincian 4 orang masing-masing menerima dana sebanyak 12,5 juta yang bersumber dari Bantuan Sosial Kabupaten, 6 orang masing-masing menerima dana sebanyak 20 juta yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional Pusat dan 5 orang masing-masing menerima dana sebanyak 20 juta dipotong pajak 14% atau sebanyak 17,2 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi dengan total anggaran yang sudah direalisasikan sejumlah 256 juta. Sehingga dari tiga tahun tersebut jumlah dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang sudah direalisasikan oleh pemerintah Desa Kebumen sejumlah 356 juta.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kebumen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya partisipasi swadaya gotong-royong dari masyarakat sekitar dan adanya ketidaktepatan peruntukan anggaran pelaksanaan program sehingga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian pencapaian tujuan program. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam proses seleksi penerima bantuan juga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan deskripsi singkat mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kebumen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebumen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dengan fokus penelitian pada implementasi program bantuan stimulant perumahan swadaya yang kemudian diteliti secara lebih mendalam menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang terutama dilakukan melalui pertanyaan terbuka,

berbagai data berupa teks dan gambar melalui pendekatan emerging (Creswell, 2014). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sebagai alat pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles et.al (2014) yaitu melalui proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akan mengkaji secara lebih mendalam suatu pelaksanaan program, yaitu pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kebumen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Dengan menggunakan empat pendekatan implementasi menurut Edward III, bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut merupakan hasil penelitian pada masing-masing aspeknya :

1. Komunikasi

Komunikasi menurut Edward III sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan hal ini akan terjadi apabila terdapat komunikasi yang berjalan dengan baik. Kebijakan yang dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten. Dengan demikian maka para pembuat keputusan dan para implementor diharapkan tetap konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan (Musfiroh, 2015 :41)

Terdapat tiga indikator yang menentukan keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: (1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi ialah adanya salah pengertian atau miskomunikasi. Birokrasi yang panjang memungkinkan informasi yang disalurkan terdistorsi ditengah jalan; (2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street- level bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan pada tataran tertentu bisa saja tidak menghalangi implementasi, yakni dengan melakukan fleksibilitas. Akan tetapi pada tataran yang lain hal ini justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan dan; (3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan kebijakan harus konsisten dan jelas. Apabila perintah yang diberikan berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana dilapangan Agustino (dalam Musfiroh, 2015 : 41-42).

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebumen bersifat top-down. Pendekatan bentuk top-down merupakan pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam pendekatan top-down implementasi kebijakan tersentralisir dan bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat pada level di bawahnya. Pada pendekatan ini peranan pemerintah sangat besar, di mana asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi,

sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain Agustino (dalam Musfiroh, 2015 : 31) Secara umum, pendekatan komunikasi top-down memiliki arah komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dilakukan dari pemerintah Desa Kebumen kepada masyarakat penerima bantuan.

Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebumen ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Program BSPS tersebut. Hal tersebut berarti komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebumen kepada masyarakat penerima program tidak dilaksanakan dengan baik.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rofiqoh dan Asmuni, pada tahun 2021 bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan pelaksana belum secara menyeluruh kepada masyarakat karena hanya sebagian masyarakat yang tahu tentang adanya bantuan ini. Dan yang di sosialisasikan pun hanya kepada warga yang dianggap berhak menerima bantuan karena sosialisasi dilakukan sekaligus mendata masyarakat yang ingin diajukan untuk menjadi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dengan demikian, mengenai komunikasi yang dilakukan dalam sosialisasi masih sangat kurang kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Menurut Aberle (dalam Angela, 2018:4) sosialisasi ialah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek

tingkah laku yang ditanamkan kepada individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif, dan sikap-sikap, guna untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasi (dinantikan), dan yang terus berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari. Sedangkan Cooley menjelaskan proses sosialisasi terbantu melalui tiga tahap antara lain adalah sebagai berikut : (1) Seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya; (2) Seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya dan; (3) Seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian yang lain terhadapnya

Oleh karena itu, penyesuaian dan komunikasi antar organisasi serta agenda realisasi merupakan mekanisme yang digunakan oleh penyelenggara kebijakan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan yang dibentuk. Dalam beberapa agenda, realisasi suatu kebijakan membutuhkan motivasi dan penyesuaian dengan penyelenggara lain. Dukungan tersebut memiliki dampak tidak langsung terhadap kinerja. Dukungan dalam hal ini dapat mencakup komunikasi yang konsisten dan penyampaian informasi terkait kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara kebijakan (Ardiansyah & Prabawati, 2023: 2460).

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pengertian SDM dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara

makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga Negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan pekerjaan). Pengertian SDM secara mikro atau sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain Nawawi (Ottay et al., 2022 :13)

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Jika para aktor memiliki responsibilitas dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil sesuai apa yang diharapkan oleh isi kebijakan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial (Sari, 2019 : 87-88).

Indikator sumberdaya terdiri dari: (1) Staf, sumberdaya utama implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak berkompeten; (2) Informasi, dalam implementasi kebijakan publik ada dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan

regulasi pemerintah yang telah ditetapkan; (3) Wewenang, kewenangan idealnya bersifat formal agar dapat dilaksanakan. Kewenangan adalah otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu tidak ada, maka kekuatan implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Akan tetapi, implementasi kebijakan kemudian tidak efektif manakala para pelaksana kebijakan menyelewengkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dan; (4) Fasilitas, fasilitas fisik juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meski implementor memiliki staf yang memadai, memahami betul apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan, implementasi kebijakan bisa saja gagal ketika fasilitas (sarana dan prasarana) tidak mencukupi Agustino (dalam Musfiroh, 2015 : 42-43)

Pelaksanaan program BSPS di Desa Kebumen telah dilaksanakan dengan baik, tetapi perlu adanya peningkatan terutama peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang masih berpendidikan rendah melalui berbagai kegiatan peningkatan kompetensi. Berikut merupakan susunan pengurus kelompok masyarakat penerima BPS Desa Kebumen.

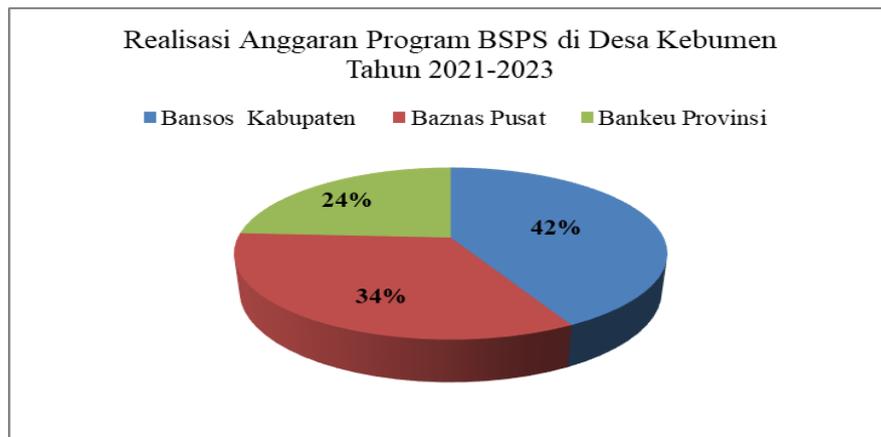
Tabel 2. Susunan Pengurus Kelompok Masyarakat Penerima BPS Desa Kebumen

No.	Nama	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1.	Muhyanto	SMA/Sederajat	Ketua
2.	Agus Supriyono	S1	Sekretaris
3.	Muchsinin	SMA/Sederajat	Bendahara
4.	Suswandi	SD/Sederajat	Anggota
5.	Surip	SD/Sederajat	Anggota

Sumber : Pemerintah Desa Kebumen, 2024

Program BSPS di Desa Kebumen memiliki 3 sumber dana yang berasal dari Bansos Kabupaten, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi. Penerima program BSPS pada tahun 2021 memiliki sasaran sebanyak 5 orang yang kemudian turun pada tahun 2022 sebanyak 3 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 15 orang. Peningkatan jumlah yang sangat signifikan pada tahun 2023 ini dilatar belakangi oleh

penambahan sumber dana yaitu dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas Pusat) dan dari Bantuan Keuangan Provinsi. Dari tahun 2021 sampai dengan 2023 jumlah dana Program BSPS yang sudah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Kebumen sebesar 356 juta rupiah. Berikut merupakan data realisasi anggaran program BSPS di Desa Kebumen pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023:



Gambar 1. Realisasi Anggaran BPS di Desa Kebumen tahun 2021-2023

Sumber : Pemerintah Desa Kebumen, 2023

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kebumen tersebut sudah berjalan cukup baik, tetapi masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya salah satunya yaitu ketersediaan dana yang terbatas sehingga menyebabkan kekurangan dana pada saat pelaksanaan pembangunan rumah tersebut.

Keterbatasan sumberdaya akan sangat mengganggu jalannya pelaksanaan kebijakan, sebagaimana pendapat Grindle yang menyatakan bahwa “pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.” Pendapat tersebut benar adanya,

dimana pada implementasi Program BPS ini terdapat beberapa kendala sehingga menghambat pelaksanaan program, yang disebabkan oleh karena sumberdaya yang ada kurang mendukung pelaksanaan program dengan kata lain ada keterbatasan pada sumberdaya yang digunakan (Hariyani, 2016 :92).

3. Disposisi

Disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh implementor seperti, komitmen dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian bahwa dimensi disposisi atau sikap pelaksana

kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus mempunyai semangat dalam menjalankan tugas dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan (Nursalim, 2017 :124)

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus bagi kepentingan warga (Agustino, 2016 : 152-153)

Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik (Puryanto & Rosadi, 2021 :89). Dalam program BPS di Desa Kebumen apabila dijalankan baik oleh para implementor akan mendapat anggapan baik pula dari masyarakat selama menjalankan program BPS.

Pelaksanaan Program BPS di Desa Kebumen tidak memiliki jadwal kegiatan yang pasti. Meskipun demikian, pengawasan pelaksanaan Program BPS di Desa kebumen dilakukan secara berkala

oleh perangkat desa bersama dengan tim pendamping dari kecamatan maupun DISPERKIM. Proses pengawasan mencakup seluruh tahapan pembangunan, mulai dari awal 0% hingga rumah jadi atau 100%.

Kriteria penerima program BPS di Desa Kebumen ada 3 yaitu dilihat dari ALADIN (atap, lantai dan dinding). Program ini fokus pada peningkatan kualitas rumah terutama dilihat dari kondisi atap, lantainya masih tanah dan pagar masih papan. Masyarakat Desa Kebumen menyambut baik dengan adanya program ini.

Adapun manfaat atau dampak positif dari implementasi program ini bagi penerima bantuan yaitu : (1) mengurangi beban hidup masyarakat miskin, karena mereka tidak lagi memiliki tanggungan untuk membuat rumah, (2) Secara psikologis meningkatkan rasa percaya diri karena rumahnya lebih bagus dari sebelumnya, (3) meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin karena dana atau penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan membangun rumah bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup lainnya, seperti untuk dana pendidikan, modal usaha, serta peningkatan kualitas sandang dan pangan, (4) dengan kondisi rumah yang memenuhi kriteria rumah layak huni, maka akan meningkatkan kualitas kesehatan, dan (5) memberikan rasa aman bagi penghuninya, (6) berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan (Hariyani, 2016: 94). Program BPS di Desa Kebumen ini sudah berjalan sesuai dengan hasil yang diinginkan dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk perbaikan kualitas dan kondisi rumah bagi

masyarakat penerimaanya.

Menurut Goulet (dalam Hariyani, 2016: 94-95) mengemukakan bahwa sedikitnya ada tiga nilai yang terkandung di dalam kesejahteraan, yaitu:

- a. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan- kebutuhan dasar hidupnya yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, pendidikan dasar, keamanan, kesehatan, rekreasi, dll.
- b. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.
- c. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif- alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk perbaikan mutu- hidup atau kesejahteraan yang terus menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.

4. Struktur Birokrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang ke empat yaitu struktur birokrasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka akan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan pengimplementasian kebijakan tersebut

tidak akan dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik (Nursalim, 2017 :124)

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi, adanya kejelasan atau tidaknya dari standar operasi, baik itu menyangkut dari mekanisme, prosedur pelaksanaan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab antar pelaku kebijakan dan tidak adanya keharmonisan antar hubungan Edward III (dalam Mabel et al., 2022: 5928). Tetapi struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Farida, 2020 :40)

Ada dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, yaitu: (1) Standar Operating Procedures (SOP), SOP merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pegawai/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang diinginkan warga dan; (2) Fragmentasi, adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan- kegiatan atau aktifitas- aktifitas pegawai Agustino (dalam Musfiroh, 2015 :44)

Pelaksanaan Program BSPS di Desa Kebumen selalu diawasi oleh perangkat desa maupun tim pendamping dari kecamatan atau kabupaten, tetapi dalam pelaksanaanya Program BPS di Desa Kebumen perangkat Desa Kebumen tidak melaksanakan SOP pelaksanaan yang berlaku. Pelaksana hanya sebatas

mendengar dan mengetahui adanya SOP tanpa benar-benar paham tentang SOP tersebut. Pelaksanaan program BSPS di Desa Kebumen hanya berbekal pengetahuan dan pengalaman dari pelaksanaan program tersebut dari tahun-tahun sebelumnya

Tenaga pendamping dari kecamatan dan dinas pun hanya sekedar memberikan dana bantuan tanpa betul-betul membina perangkat desa dan masyarakatnya secara langsung di lapangan. Pelaksanaan program BSPS di Desa Kebumen tidak memiliki pelatihan ataupun pendampingan secara teknis baik untuk tim pelaksana maupun masyarakat penerima bantuan. Tetapi pada saat pelaksanaan program ada pendampingan dari tim kecamatan dan tim dari kabupaten.

Syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai calon penerima bantuan Program BPS di Desa Kebumen hanya dengan mengumpulkan dokumen yaitu berupa fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut diketahui bahwa di Desa Kebumen, pelaksanaan program BPS yang dilakukan belum sesuai dengan SOP yang ada.

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puryanto & Rosadi pada tahun 2021 bahwa struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya SOP (Standart Operating Procedures). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Standart Operating Procedur (SOP) memang sangat memiliki pengaruh dalam kelancaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS). Namun hal itu tidak bisa juga kita lepaskan bagaimana pengaruh hubungan antar birokrasi dalam program BPS ini, karena hubungan birokrasi yang baik akan menciptakan sebuah koordinasi yang baik pula antar birokrasinya, dan sebaliknya hubungan birokrasi yang tidak baik akan menciptakan sebuah koordinasi yang tidak baik pula antar birokrasinya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kebumen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dilaksanakan dengan pendekatan top-down dan belum sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dikarenakan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebumen kepada masyarakat penerima program bantuan tidak dilaksanakan dengan baik, kualitas SDM nya masih rendah, ketersediaan dana yang terbatas, dan tim pelaksana program tidak mengetahui dan melaksanakan SOP yang berlaku.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. CV. Alfabeta.
- Angela, N. (2018). Modul Sosiologi: Sosialisasi. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Ardiansyah, F., & Prabawati, I. (2023). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Rangka Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 11(4), 2455–2464.

- Creswell, John W. (2014). Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi Keempat dalam Bahasa Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7, 35–47.
- Hariyani, T. (2016). Dampak Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 2(2), 77–99.
- Desyra, T. E., & Et, A. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jap : Unsrat*, 8(110), 35–45.
- Miles, Matthew B, et al. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Book 3rd Edition*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Musfiroh, R. (2015). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. *Studi Administrasi Publik*, 5 (3),117–126.
- Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. *Studi Administrasi Publik*, 5 (3),117–126.
- Ottay, D. K. D., Rorong, A. J., & Tampongangoy, D. L. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan Sario Kota Manado. *Jap*, 8(115), 10–17.
- Puryanto, P., & Rosadi, R. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(1), 85–91.
- Puryanto, P., & Rosadi, R. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(1), 85–91.
- Rofiqoh, S., & Asmuni. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017. *Cahaya Ilahi*, 3(1), 25–39.
- Sari, D. M. (2019). Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah (Studi Kasus Kecamatan Kotabumi Selatan). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.